

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

### B. Buku:

A. Daim, Nuryanto. *Hukum Administrasi: perbandingan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.

Anwar, Sabri Shaleh dan Jamaluddin. *Pendidikan Al-Quran* Tembilahan: Pt. Indragiri Dot Com. 2020.

Asmara, Galang. *Kedudukan Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan (Hukum Kelembagaan Negara)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2003.

Basrowi, Suwardi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara. 2013.

Gunawan, Yopi. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Haryatmoko. *Pelayanan Publik*, Jakarta: PT. Gramedia Pusat Jakarta, 2011.

- Hartono, Sunaryati et all. *Panduan Investigasi untuk Ombudsman Republik Indonesia*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003.
- Jonathan, Sarwon. *Metode Penelitian Metode Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Kusdarini, Eny. *Asas-asas Umum Yang Baik Dalam Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi. kedua. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Munir. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 1993.
- Nuridin, Ali. *Qur'anic Society Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an*. T.K.: Erlangga. 2006.
- Nursadi, Harsanto. *Hukum Administrasi Negara Sektoral cetakan kedua*, Depok: CLGS dan Badan Penerbit FH UI, 2019.
- Nurthajo, Hendra, Yustus Maturbongs dan Diani Indah Rachmitasari. *Memahami Maladministrasi Cet. I*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia. 2013.
- Putra, Fadhilla. *New Public Governance*. Malang: UB Press, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Cv. Alfabeta. 2014.
- Sujata, Antonius. *Ombudsman Indonesia : Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.
- Surybrata, Sumarji. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali. 1992.

Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.

Widodo, Joko. *Etika Profesi Pelayanan Publik*. Malang: Cv. Citra. 2001.

Widodo, Joko. *Good Governance*, Surabaya: Insan Cendikia, 2001.

### C. Karya Tulis Ilmiah

Aziz, Ahmad Imamul. *Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember. 2018.

Dahlana, SH. *Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta. 2016.

Simanjuntak, Enrico. *Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam Memperkuat Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014.

Yasin, Muhammad Rus'an. *Telaah Tentang Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan*. Jurnal Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016.

Wahyudi, Rody et.al. *Perilaku Maladministrasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau : Faktor Penyebab dan Solusinya*, Jurnal Administrasi Publik, No. 1, Volume 12, 2015.

### D. Internet

Artikel Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan. Diakses <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--banyaknya-laporan-terkait-dugaan-penundaan-berlarut-eksekusi-pengadilan-ombudsman-kalsel-undang-ahli-dari-hakim-pengadilan-tinggi->, 13 agustus 2020.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-mengawasi> (diakses tanggal 31 Mei 2021)